

ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MITRA WARGA PADA DESA PASIRHALANG KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI

Ari Datul Risalah¹, Elan Eriswanto²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Jl. R. Syamsudin, SH. No. 50 Kota Sukabumi
Email: aridatul.risalah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Warga. Fenomena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa unit usaha BUMDes Mitra Warga telah tidak aktif lagi, mengakibatkan penurunan pendapatan BUMDes dan, akibatnya, Pendapatan Asli Desa juga turun karena BUMDes merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya efektivitas para pengelola BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BUMDes Mitra Warga Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja dapat dianggap kurang baik. Namun, kinerja dapat meningkat jika para pengelola mengikuti pelatihan sosialisasi mengenai pengelolaan yang efektif dan memperbaiki faktor-faktor terkait sehingga BUMDes dapat meningkatkan pendapatannya, berdampak pada Pendapatan Asli Desa.

Kata Kunci: Kinerja BUMDes, Kualitas Layanan, Responsivitas, Akuntabilitas.

ABSTRACT

This research aims to assess the performance of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Mitra Warga. The phenomenon in this study indicates that some units of BUMDes Mitra Warga have become inactive, resulting in a decrease in BUMDes' revenue, consequently affecting the Village Original Revenue (PAD) since BUMDes is one of the sources of PAD. This may be attributed to the inadequate performance of the BUMDes managers. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. The types of data used include primary and secondary data collected through observation, interviews, and documentation. The analysis methods encompass data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study reveal that the performance of BUMDes Mitra Warga in Pasirhalang Village, Sukaraja Subdistrict, can be considered subpar. However, performance can improve if the managers undergo training and socialization on effective management practices and if related factors are enhanced. This would lead to an increase in BUMDes revenue, consequently contributing to the Village Original Revenue.

Keywords: BUMDes Performance, Service Quality, Responsiveness, Accountability.

PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian dari sebuah wilayah kabupaten yang memiliki otonomi asli. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ina Mustika, 2022).

Sebetulnya Desa telah mendapatkan bantuan pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, bantuan tersebut digunakan untuk mempercepat pembangunan desa. Meskipun Desa telah mendapatkan bantuan dari pendapatan tersebut, tetapi diperlukan juga suatu badan yang mengurus aset Desa dan untuk memperoleh sumber pendapatan sendiri demi terwujudnya keseimbangan dana pembangunan. Sumber Pendapatan Asli Desa lain yang dapat diusahakan oleh Desa salah satunya yaitu dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar Desa mampu menghindari kesulitan anggaran dan tidak hanya bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Kinerja merupakan hal yang sangat penting baik dalam tingkat organisasi kecil maupun besar, hasil kerja yang dicapai oleh individu atau organisasi adalah bentuk tanggungjawab kepada organisasi. Dalam menjalankan fungsinya kinerja tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kinerja.

Menurut (Rukin, 2021) Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Kinerja BUMDes dapat diukur menggunakan aspek Kualitas layanan, Responsivitas dan Akuntabilitas.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. (Madjodjo & Dahlan, 2020). Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan atau usaha-usaha ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Maka dari itu pengelola BUMDes harus bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar. Hal ini bisa menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Sehingga nantinya Badan Usaha Milik Desa akan menjadi pilar kemandirian masyarakat desa, sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa ini terdapat 4 pasal yang menjelaskan tentang BUMDes dimana pasal 87 yang sebagaimana disebutkan:

“Desa dapat mendirikan Badan Usaha Miliki Desa yang disebut sebagai BUMDes, BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, BUMDes dapat menjalankan kegiatan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu dengan cara mendirikan BUMDes. Melalui BUMDes diharapkan kemakmuran dan kemandirian desa dapat ditingkatkan dengan adanya Pendapatan Asli Desa. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Sedangkan tujuan dari pendirian BUMDes salah satunya adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pedesaan. (Mardiyanti¹, Asrofi Lannggeng Noerman Syah², 2018)

Kegiatan BUMDes sering juga menghadapi kendala, seperti dalam permodalan, rasa tanggungjawab terhadap tugas yang masih rendah, manajemen yang kurang baik dan permasalahan yang sering dihadapi oleh BUMDes yaitu kualitas kinerja Sumber daya manusia yang masih rendah. Kinerja BUMDes sangat di pengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat kinerja sumber daya manusia. Pentingnya kinerja BUMDes dalam hal pengelolaan BUMDes yaitu untuk meningkatkan kinerja pengelola BUMDes dalam mencapai kinerja yang baik.

Pada BUMDes Mitra Warga endapatan terbesar selama 3 tahun kebelakang ini yaitu pada bidang simpan pinjam dengan pendapatan sebesar Rp. 19.620.000. Namun untuk bidang usaha simpan pinjam sudah tidak berjalan karena BUMDes yang terdapat di Desa Pasirhalang beberapa tahun kebelakang ini kurang menunjukkan kinerja dan eksistensinya. Dirasa masih kurangnya kualitas pelayanan pengelola BUMDes sehingga salah satu bilang usaha yaitu usaha simpan pinjam menjadi tidak berjalan. BUMDes ini di dirikan agar keuangan Pemerintah Desa dapat meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan penghasilan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Tujuan dan sasaran Badan Usaha Milik Desa dapat tercapai jika Badan Usaha Milik Desa dikelola secara terarah dan profesional. Resposivitas pengelola BUMDes dirasa masih rendah untuk mengenali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat karena kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan semakin meningkat maka pengelola BUMDes harus mengetahui dan melayani agar mampu bersaing dengan lembaga usaha yang lain. Oleh karena itu diperlukan kemampuan pengelolaan yang baik agar kinerja BUMDes menjadi lebih baik.

Pengelola BUMDes harus memahami tentang pengelolaan yang baik karena BUMDes harus di kelola dengan baik, profesional dan harus sesuai dengan bidang pengelolaanya dan dilihat dari aspek akuntabilitasnya masih rendah, BUMDes perlu menyusun laporan keuangan karena sebagai alat pertanggungjawaban yang merupakan salah satu sumber informasi yang relvan dan dapat diandalkan untuk mengambil sutau keputusan. pengelola BUMDes harus bisa mempertanggung jawabkan dan membuktikan mengenai apa yang telah di kelolanya salah

satu yang harus di pertanggungjawabkan yaitu laporan keuangan dengan begitu Kinerja suatu BUMDes akan memiliki pengaruh dan berperan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa. Keberadaan dan kinerja BUMDes juga dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian. Maka dari itu adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Warga Pada Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja

Kinerja organisasi dapat dipandang berdasarkan kemampuan dalam mengelola anggarannya, BUMDes setiap mendapat anggaran harus dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang telah ditentukan satu periode waktu tertentu. Hal ini untuk mendukung sebagai salah satu proses pengelolaan, pengumpulan dan engkomunikasian informasi untuk menilai kinerja dan untuk mengambil keputusan. (Madjodjo & Dahlan, 2020).

Menurut (Sholehudin, 2022) mengatakan bahwa Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan dapat diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Kinerja merupakan sebuah proses atau pencapaian yang dapat diukur dari hasil yang diperoleh oleh individu atau organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewajiban atau tanggungjawab yang dimilikinya. Proses ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan sejauh mana suatu tujuan berhasil tercapai, sejauh mana standar telah dijalankan, dan sejauh mana tanggungjawab telah terpenuhi. Secara lebih konkret, kinerja individu atau organisasi dapat tercermin dalam produktivitas, kualitas hasil kerja, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kemampuan untuk memenuhi harapan atau target yang telah ditetapkan.

Selain itu, kinerja juga dapat diartikan sebagai indikator keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Kemampuan individu atau organisasi untuk konsisten dan efektif dalam menunaikan tugas-tugasnya secara optimal dapat menjadi tolok ukur yang penting dalam mengevaluasi kinerja. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target, namun juga pada upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan standar kinerja tersebut. Dengan memahami signifikansi kinerja, individu atau organisasi dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas hasil kerja, serta memastikan agar tujuan dan standar tetap tercapai dengan baik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut (Mahmudi, 2015) mengatakan bahwa Kinerja merupakan suatu konstruk multimensial yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Kinerja dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu dan pengaruh dari factor- factor yang ada. factor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

- a. Faktor personal/individu, meliputi: kemampuan, pengetahuan, motivasi, keterampilan, kepercayaan diri dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan arahan, semangat dorongan, dan dukungan yang diberikan manager dan team leader.
- c. Faktor tim, meliputi: kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
- d. Faktor sistema, meliputi: sistem kerja, proses organisasi, fasilitas kerja ataupun infrastruktur yang diberikan organisasi, dan kultur kinerja organisasi.
- e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal maupun internal.

Penilaian dan Pengukuran Kinerja

Menurut Simanjuntak dalam (Rusdiana A, 2021) mengemukakan bahwa penilaian kinerja adalah penentuan secara periodeik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian operasional dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kinerja kreteria yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut simanjuntak mengatakan bahwa penilaian kinerja memberikan dua alasan penting yaitu untuk memperbaiki pelayanan publik dan memperbaiki akuntabilitas. Sedangkan menurut mahmudi 2002, dalam (Rusdiana A, 2021) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja didefinisikan sebagai alat ukur untuk menilai hasil dan efisiensi jasa atau program berdasarkan basis reguler (tetap, teratur). Dalam pengukuran kinerja, diperlukan indicator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penelitian kinerja manajemen akan mengalami kesulitan untuk mengukur kinerja apabila tidak terdapat indikator kinerja yang memadai. Dalam pengukuran kinerja, informasi yang digunakan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

- a. Informasi Finansial

Penilaian laporan keuangan kinerja finansial dapat diukur pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut akan dilakukan dengan cara menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis

besar berfokus pada varians pendapatan, pengeluaran, belanja rutin, belanja investasi/modal

b. Informasi Non-Finansial

Pengukuran kinerja merupakan proses untuk menilai kemajuan suatu organisasi untuk dapat menacapai tujuan dan sasaran yang telah di tentukan. Pengukuran kinerja ini membantu kepala unit usaha dalam memperbaiki kinerja untuk bisa fokus kepada tujuan organisasi.

BUMDes

Menurut Putra 2015, dalam (Haryanti & Subadriyah, 2019) mengemukakan BUMDes adalah salah satu lembaga perekonomian yang beroperasi di daerah pedesaan, namun harus memiliki perbedaa dibidang usaha denngan lembaga ekonomi pada umumnya.

Menurut wijaya dalam (Rosari et al., 2022) mengemukakan bahwa BUMDes strategi kebijakan membangun indonesia dari pinggiran melalui pembangunan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif. Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang sebagaian atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa yang diberikan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa dan dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

BUMDes adalah lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi, mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa dan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Tujuan Pendirian BUMDes

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai usaha untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar desa. Didalam pasal 3 permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Landasan Hukum BUMDes

Menurut (Sujarweni, 2019) Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan BUMDes yang dituangkan dalam aturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur desa. Dalam buku Akuntansi BUMDes (Sujarweni, 2019) mengemukakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pada pasal 87 sampai 90 tentang Badan Usaha Milik Desa yang dimana isinya adalah:

Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes
- (2) BUMDes dapat dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa
- (2) Pendirian BUMDes sebagai yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUMDes dapat dimanfaatkan untuk:

- (1) Pembangunan usaha.
- (2) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dan bergukir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Desa.

Pasal 90

Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:

- (1) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
- (2) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- (3) Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa.

Kinerja BUMDes

Kinerja BUMDes yang baik akan dapat dianalisis dari beberapa parameter, diantaranya yaitu: kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat desa seperti apa, keberlangsungan dan

keuntungan usahanya. Pelayanan yang baik akan dapat menarik masyarakat agar ikut berpartisipasi kepada BUMDes. Pendapatan dan keuntungan yang stabil dan terus meningkat akan menjaga keberlangsungan BUMDes itu sendiri. (Qosjim, 2017)

Keberhasilan dan berkembangnya BUMDes dalam menjalankan tugas dan kewajibannya itu terletak di pundak para pengurus/pengelola BUMDes, meskipun bentuk BUMDes terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan badan usaha lainnya, akan tetapi dalam menjalankan program BUMDes tidaklah sederhana karena dalam implementasi program yang ada, para pengurus BUMDes harus benar-benar mengenali keadaan serta potensi desa setempat dan harus selalu berinovasi untuk menghadapi setiap perubahan yang ada, dengan tidak mengabaikan tujuan hanya ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada, seperti sumber daya manusia, finansial, *standard operational prosedur* (SOP) dan lain-lain. (Jaryono & Tohir, 2019)

Kinerja BUMDes adalah suatu proses penting yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menentukan sejauh mana BUMDes telah mampu mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja juga bertujuan untuk menentukan apakah BUMDes tersebut telah mencapai standar yang dianggap memadai atau apakah masih terdapat area yang perlu ditingkatkan. Dengan memahami dan menilai kinerja BUMDes secara sistematis, dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi peningkatan dan memastikan bahwa BUMDes dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes Mitra Warga

Jenis bidang usaha yang hingga saat ini terkelola oleh BUMDes Mitra warga ada 2 jenis bidang usaha yaitu:

a. Produksi batik

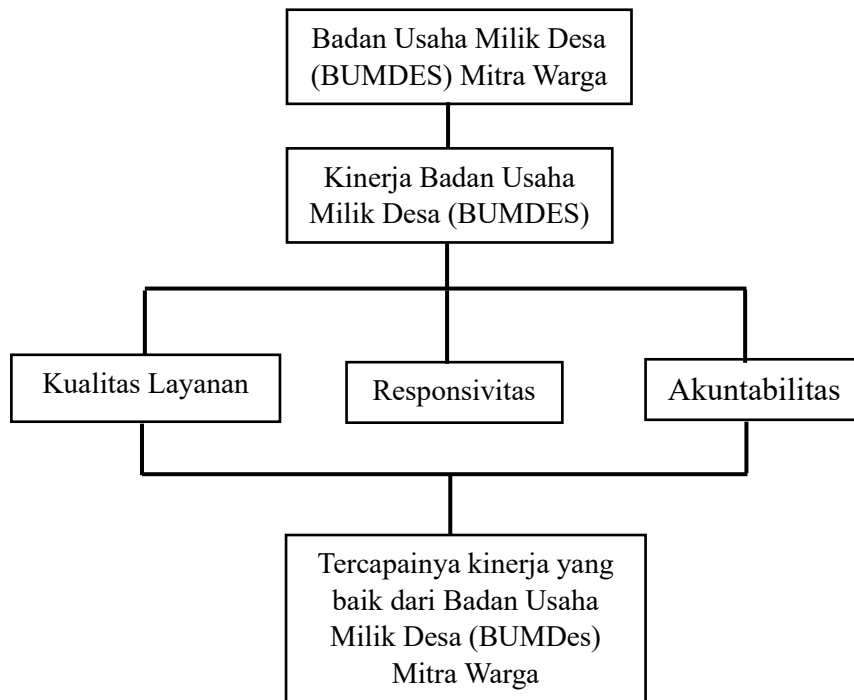
Unit usaha batik didirikan Pada tahun 2018 yang berawal dari salah seorang pengelola BUMDes yang mempunyai keterampilan dalam hal membatik yang akhirnya BUMDes membuka unit usaha produksi batik lokasi untuk membatik berada di rumah batik al-syafa yang berlokasi di Kp.

b. Pertanian

Desa pasirhalang mempunyai lahan yang lumayan cukup untuk digunakan dalam bercocok tanam, akhirnya pengelola BUMDes berinisiatif untuk memanfaatkan tanah

tersebut untuk di jadikan perkebunan yang akhirnya tanah tersebut dikelola oleh BUMDes menjadi kebun sayuran.

Kerangka pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

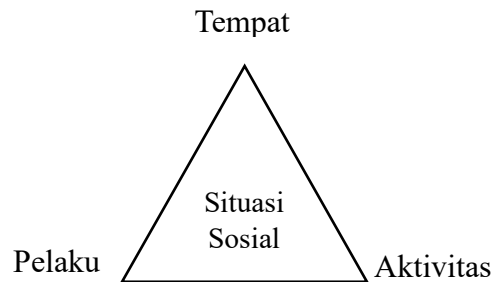
Metode dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2019) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dan dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Situasi Sosial

Menurut (Sugiyono, 2019) Dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah populasi, akan tetapi dengan dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*). Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui.

Dalam penelitian kualitatif, penting untuk mengakui bahwa situasi sosial dapat menjadi obyek penelitian yang ingin diungkap dan dipahami secara mendalam. Dengan mengeksplorasi elemen-elemen tempat, pelaku, dan aktivitas dalam suatu konteks tertentu,

peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial yang terjadi. Pendekatan ini memberikan ruang bagi interpretasi dan analisis yang lebih mendalam terhadap berbagai aspek dari situasi sosial tersebut, memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang lebih luas dari fenomena yang mereka teliti.



Gambar 2 Situasi Sosial

Berdasarkan penjelasan diatas, informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling adalah:

1. Aparatur Desa
2. BPD
3. Pengelola BUMDes
4. Masyarakat

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi : kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi
- b. Wawancara : percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak
- c. Dokumentasi : proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang berupa tulisan, lisan, gambar maupun bentuk lainnya.

Teknik Analisis Data

Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengumpulan data : yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan terhadap penilaian Kinerja BUMDes Mitra Warga.
- b. Reduksi data : proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

- c. Penyajian data : Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
- d. Penarikan kesimpulan : merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Warga Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi

Untuk mengetahui Kinerja BUMDes Mitra Warga dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

Kualitas Layanan BUMDes Mitra Warga

Kualitas layanan didalam suatu organisasi sangat dibutuhkan karena untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dari hasil kerjanya. Kualitas layanan akan menjadi lebih penting dalam memberikan pelayanan karena hakekat dari suatu bentuk kepuasan bagi pelanggan atau masyarakat akan merasa terpenuhi ketika kualitas layanan yang diberikannya secara baik.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan bahwa “kualitas layanan yang diberikan oleh BUMDes Mitra Warga dirasa masih kurang karena pengelola masih kurang memahami tentang cara pengelolaan yang baik sehingga kualitas sumber daya manusia yang ada di BUMDes ini masih perlu untuk di tingkatkan dan mengakibatkan kualitas layanan masih kurang, masih banyak juga masyarakat yang belum merasakan pelayanan BUMDes.”

Jadi kualitas layanan yang diberikan oleh BUMDes belum begitu baik karena sumber daya manusia yang ada dapat mempengaruhi kualitas layanan, sementara sumber daya manusianya masih perlu untuk di tingkatkan dalam hal pengelolaannya, pengurus sudah mengetahui cara pengelolaan yang baik maka pelayanan yang diberikan akan lebih baik. dan masyarakat yang merasakan pelayanan BUMDes akan memberikan penilaian bagus juga kepada BUMDes.

Responsivitas BUMDes Mitra Warga

Dalam mencapai kepuasan masyarakat terhadap BUMDes maka diperlukan adanya Responsivitas (mengenali kebutuhan masyarakat). Responsivitas ini berkaitan dengan kemampuan pengelola untuk mengetahui atau mengenali yang menjadi kebutuhan atau keinginan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan BUMDes dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan bahwa “masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan program atau unit-unit usaha yang ada di BUMDes jadi tidak sedikit masyarakat yang belum merasakan akan pelayanan BUMDes ini dirasa masyarakat membutuhkan informasi yang lebih transparansi mengenai BUMDes dan pengurus harus lebih responsiv kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mengenal BUMDes dan akan berkontribusi dalam mengembangkkn BUMDes.”

Maka BUMDes Mitra Warga masih kurang responsiv kepada masyarakat sekitar sehingga masih banyak masyarakat yang belum merasakan pelyanan BUMDes karena unit usaha yang ada di BUMDes untuk saat tidak menjadi kebutuhan masyarakat sekitar untuk itu pengurus harus lebih mengenali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga yang menjadi kebutuhan masyarakat agar lebih mudah didapatkan di BUMDes Mitra warga dan ini menjadi salah satu untuk mengembangkan program tau unit-unit usaha, karena setelah mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat maka BUMDes dapat menambah unit usaha sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan pengelola agar lebih mensosialisasikan ataua memberikan informasi mengenai unit-unit usaha yang ada di BUMDes.

Akuntabilitas BUMDes Mitra Warga

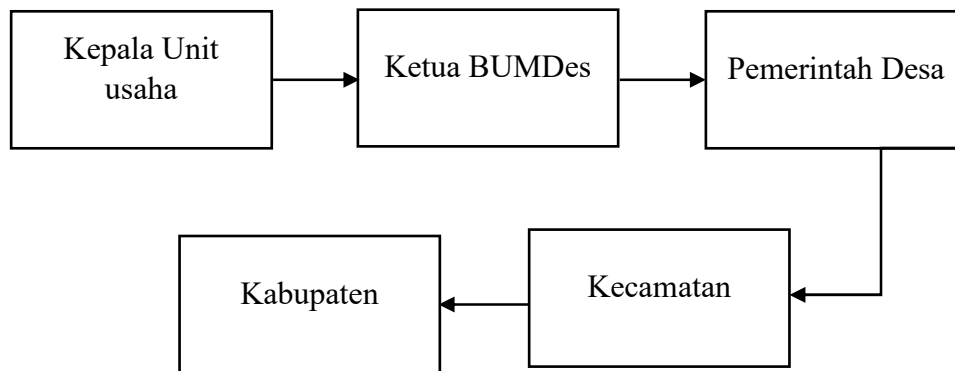
Dalam sebuah organisasi dibutuhkannya Akuntabilitas karena digunakan untuk mengukur tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun organisasi yang berkaitan dengan adminitrasi dalam mencapai hasil yang sudah ditetapkan. Akuntabilitas juga untuk menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi tersebut.

Laporan pertanggungjawaban BUMDes Mitra Warga biasanya dilaksanakan setahun sekali ketika rapat anggota tahunan, dimana yang menghadiri kegiatan tersebut adalah para pengelola BUMDes, aparatur desa.

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan bahwa “setiap unit usaha selalu melakukan laporan pertanggungjawaban untuk melaporkan apa saja yang telah dilakukannya dan selalu melaporkan laporan keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali namun terkadang mengalami keterlambatan dalam melaporkan laporan keuangannya.”

Maka akuntabilitas yang ada sudah cukup baik karena selalu membuat laporan pertanggungjawaban yang selalu dilaporkan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Tahapan melaporkan laporan pertanggung jawabana sebagai berikut:



Gambar 3 Tahapan Pelaporan

Setiap kelapa unit melaporkannya kepada ketua BUMDes lalu dari ketua BUMDes dilaporkan kepada Kepala Desa dan BPD untuk dikaji berkaitan dengan pengembangan usahanya dan itu juga sebagai bahan laporan kepada masyarakat, karena anggaran dari pemerintah dikelola oleh BUMDes dan harus di pertanggungjawabkan berikut juga dengan keuntungan sebab dari keuntungan itu ada timbal baliknya kepada pemerintah desa sebagai pendapatan asli desa.

Kemudian untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan juga biasanya di laporkan setiap satu tahun sekali, namun pelaporan keuangan masih sering terlambat tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya untuk melaporkan keuangan karena dirasa para pengelola dalam mengerjakan laporan keuangannya masih kurang menguasai dan laporan keuangan yang dibuat juga belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) hanya laporan keuangan sederhana yang lebih memfokuskan kepada laporan Laba/Rugi karena untuk melihat apakah unit usaha itu mengalami kerugian atau mendapatkan laba dan itu juga sebagai bahan untuk menilai apakah unit usaha tersebut masih layak untuk dilanjutkan atau tidak. Laporan keuangan dibuat sebagai salah satu acuan untuk mengambil keputusan dan menentukan layak tidaknya unit usaha tersebut untuk dilanjutkan, kemudian laporan keuangan juga akan merujuk kepada penyertaan modal dan dapat menambah ke Pendapatan Asli Desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Warga Pada Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Maka peneliti menarik kesimpulan dilihat dari tiga aspek menurut (Rukin, 2021)

yaitu: Kualitas layanan, Responsivitas dan Akuntabilitas. Bahwa kinerja BUMDes Mitra warga masih kurang baik.

Kualitas layanan pada kinerja BUMDes Mitra dapat dikatakan kurang baik karena masih ada pengelola yang tidak mengetahui bagaimana cara mengelola BUMDes dengan baik. hal ini bisa menjadi penyebab kinerja BUMDes kurang baik dan untuk untuk kepuasan layanan juga masih kurang, tidak sedikit masyarakat yang belum mengenal BUMDes.

Responsivitas yaitu mengenali kebutuhan masyarakat dan mengembangkan program-program/unit usaha yang ada di BUMDes. Untuk mengenali kebutuhan masyarakat harus di tingkatkan karena produk yang saat ini ada di BUMDes Mitra warga dirasa bukan menjadi kebutuhan masyarakat sekitar sehingga masih ada masyarakat yang belum merasakan layanan BUMDes. Dengan cara mengenali kebutuhan masyarakat sekitar ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengembangkan program-program/unit usaha yang ada di BUMDes.

Akuntabilitas di BUMDes Mitra warga sudah cukup baik karena setiap kegiatan selalu dibuat laporan pertanggung jawaban untuk di laporkan pada saat rapat anggota tahunan, namun dalam menyelesaikan laporan keuangannya masih belum cepat tangkap karena dalam melaporkan laporan keuangan sering mengalami keterlambatan dan laporan keuangan yang dibuat lebih mengutamakan kepada laporan Laba/Ruginya saja, hal itu dikarekankan kurangnya pemahman pengelola dalam membuat laporan keuangan.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Warga Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi agar kinerja BUMDes Mitra warga menjadi lebih baik. Adapun saran tersebut adalah:

1. Pemerintah Desa Diharapkan pemerintah desa dapat memberikan kebijakan untuk penguatan dan pengembangan BUMDes melalui peningkatan permodalan, kerjasama pengelolaan asset desa.
2. Pengelola BUMDes
 - a. Untuk aspek kualitas layanan diharapkan bisa mengikuti atau mengadakan pelatihan khususnya untuk pengelola BUMDes Mitra Warga agar para pengelola bisa lebih mengetahui mengenai cara mengelola BUMDes yang baik. sehingga akan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan membuat masyarakat atau pelanggan puas atas layanan yang diberikan oleh BUMDes Mitra Warga.

- b. Untuk aspek responsivitas supaya lebih mengenali kebutuhan masyarakat sehingga nantinya bisa menambah unit usaha dengan produk yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar dan harus mensosialisasikan program-program atau unit-unit usaha yang ada di BUMDes Mitra Warga kepada masyarakat Desa Pasirhalang sehingga masyarakat bisa lebih berkontribusi terhadap BUMDes.
 - c. Untuk aspek akuntabilitas diharapkan agar mengadakan pelatihan mengenai pembuatan laporan keuangan sehingga dalam membuat laporan keuangan sudah dapat menguasai bagaimana cara membuat laporan keuangan yang baik dan pada saat melaporkan laporan keuangan dapat tepat waktu.
3. Bagi peneliti selanjutnya Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih mengembangkan tujuan yang diteliti, dapat menggunakan lebih banyak sumber untuk bahan referensi, juga dapat menambah variabel dan bisa melakukan penelitian dengan metode kuantitatif sebagai bahan perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryanti, N., & Subadriyah. (2019). Analisis pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) amanah jati di desa jambu timur. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 3(2), 80–94.
- Ina Mustika, S. (2022). *Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran*. 4860–4861.
- Jaryono, & Tohir. (2019). Analisis Kinerja BUMDes “ MITRA USAHA MAKMUR ” dalam Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). *Sustainable Competitive Advantage-9 (Sca-9)*, 9(23), 23–30.
- Madjodjo, F., & Dahlan, F. (2020). Analisis kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan pengolahan potensi desa di Desa Akedotilou. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 187. <https://doi.org/10.32400/iaj.31055>
- Mahmudi, R. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. In *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*.
- Mardiyanti¹, Asrofi Lannggeng Noerman Syah², E. P. (2018). *Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Pada Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal*. 1–8.
- Qosjim, A. (2017). Analisis Kinerja BUMDes di Kabupaten Lumajang (Performance Analysis BUMDes in Jember District). *Journal Ekuilibrium*, II(1), 10–17.
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. I. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi. *Owner*, 6(3), 2921–2930. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870>
- Rukin. (2021). *Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa* (Tarmizi (ed.)). PT Bumi Aksara.

- Rusdiana A, N. (2021). *Akuntabilitas kinerja dan penelitian* (T. N. Dulwahab Encep (ed.)). Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Sholehudin. (2022). *Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia Performance Analisis*. CV. ABSOLUTE MEDIA.
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN: Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sujarweni, V. W. (2019). Akuntansi bumdes (badan usaha milik desa). In *Yogyakarta: pt pustaka bary*.